

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Kantor pemerintahan salah satu gasilitas utama dalam menjalankan pemerintahan di suatu daerah. Dalam menjalankan otonomi pemerintahan daerah, walikota dan wakil walikota harus memiliki kantor pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan demi menunjang pembangunan nasional dan penerapan visi dan misi pemerintahan, selain menunjang penerapan visi dan misi kantor pemerintahan khususnya kantor walikota bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat sebagai pusat pelayanan publik, di mana ada bagian bagian dari pemangku kebijakan dan pemangku jabatan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam melakukan penerapan program kerja. Kota Payakumbuh dalam menjalankan otonomi daerah nya yang ke 48 tahun saat ini masih gencar dan aktif dalam melakukan peningkatan Pembangunan, Perekonomian Masyarakat, dan juga peningkatan kota yang agamis sesuai dalam Filasfat masyarakat Minangkabau, *Adat basandi Syarak, syarak basandi kitabullah.*

Dalam mengatur otonommi daerah dan meningkatkan pembangunan nasional daerah memerlukan pelayanan publik yang optimal dan profesional. Pelayanan publik sebagai salah satu aktifitas yang dilakukan oleh Birokarasi Publik yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna menurut (Agus Dwiyanto, 2005: 141). Warga pengguna yang dimaksudkan di sini adalah Masyarakat yang hidup di Daerah Tersebut yang membutuhkan Pelayanan Publik seperti Administrasi Negara, Administrasi Keuangan, dan Perihal Isu Sosial Lainnya yang di butuhkan oleh masyarakat. Dalam memfasilitasi pelayanan publik ini tentu di butuhkan kantor yang ideal dan menunjang Fasilitas pengguna dalam melakukan aktifitas yang akan dalam waktu jangka panjang. Dalam memfasilitasi ruang yang mampu menunjang hasil pekerjaan yang maksimal dalam perancangan ini memberi pertimbangan kepada kondisi ruang, meliputi dimensi ruang, sirkulasi ruang, dan organisasi ruang bagi para pejabat daerah, ASN (Aparatur Sipil Negara), dan masyarakat, dengan standarisasi yang mengacu pada permendagri No. 7 Tahun 2006.

Pada saat sekarang ini kantor memiliki permasalahan-permasalahan interior seperti hubungan antar ruang yang tidak sesuai dengan alur kerja dari kantor walikota, standarisasi ruang dan *furniture* yang belum sesuai standar nasional yaitu Permendagri No. 7 Tahun 2006, masih kurangnya fasilitas ruang sesuai kebutuhan kantor yang memiliki. Pada Oktober 2017 Pemerintah Kota Payakumbuh akan melakukan penambahan program kerjadalam tugas pejabat pemerintahan, yang pada awalnya bergerak di bidang ekonomi, pemerintahan, dan politik menjadi di bidang ekonomi, pemerintahan, sosial, politik, dan administrasi Publik, dimana ini di tujukan untuk Pemerintahan Daerah memfasilitasi masyarakatnya dengan pelayanan publik yang professional dan menghilangkan stigma dari masyarakat tentang ketakutan akan kesulitan birokrasi dalam pemerintahan

Melalui penjelasan diatas, maka akan dilakukan penelitian dan perancangan Interior Kantor Walikota Payakumbuh, dengan mengaplikasikan optimalisasi kebutuhan Ruang, kebutuhan aktifitas dan fasilitas pengguna dalam perancangannya. dengan karakter Kota Payakumbuh dengan tidak meninggalkan kearifan lokal dari kota payakumbuh. Dalam perancangan ini juga di dasari kepada aturan pemerintah yang menjadi acuan perancangan nantinya alam memfasilitasi pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Merujuk pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan Perencanaan Interior Kantor Walikota Payakumbuh antara lain:

1. Menyediakan Kantor walikota yang sesuai standarisasi kantor pemerintahan.
2. Menyediakan Fasilitas dan kebutuhan ruang yang optimal dan sesuai standar ruang kantor pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Menciptakan desain ruang yang sesuai dengan organisasi ruang dan alur sistem pekerjaan dari Kantor Walikota dan Pusat Pelayanan Publik kota Payakumbuh.

4. Menyediakan fasilitas kantor yang ramah akan pelayan publik dan menghasilkan kualitas pekerjaan yang optimal.
5. Penerapan unsur budaya loka dalam estertika sebagai *Brand Identity* pada Kantor Walikota Payakumbuh dan Pusat Pelayanan Publik.

### **1.3.Rumusan Masalah**

Dari identifikasi masalah yang telah di jabarkan sesuai diatas akan di rumuskan rumusan masalah dalam Perancangan Interior Kantor Walikota Payakumbuh.

1. Bagaimana menciptakan kantor walikota yang sesuai dengan standarisasi kantor pemerintahan ?
2. Bagaimana cara menerapkan desain ruang yang optimal dan sesuai standar ruang kantor pemerintahan dan fasilitas pelayanan publik?
3. Bagaimana menciptakan desain kantor dan pelayanan publik yang berintegrasi dengan alur dan sistem kerja ?
4. Bagaimana menciptakan kantor yang tergabung dengan fasilitas pelayanan publik tanpa mengganggu aktifitas masing masing?
5. Bagaimana bentuk desain dan penerapan desain dengan pendekatan budaya lokal sebagai *Brand Identity* kantor walikota dan pusat pelayanan publik kota payakumbuh ?

### **1.4.Batasan Perancangan**

Adapun batasan masalah yang ada pada perancangan interior Kantor Walikota dan Pusat Pelayanan Publik kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Luasan Perancangan ini 6150 m<sup>2</sup>, perancangan sudah meliputi area administrasi pemerintahan dan area pusat pelayanan publik.
2. Perancangan interior kantor walikota dan pusat pelayanan publik yang ada di kota Payakumbuh.
3. Perancangan Interior dengan memperhatikan standarisasi pemerintah dan teori dari buku sesuai dengan bidang perancangan interior kantor.

## **1.5.Tujuan Perancangan**

Tujuan Perencanaan Perancangan Interior Kantor Walikota Kota Payakumbuh.

1. Meneliti Solusi perancangan dari permasalahan perancangan sebelumnya sehingga menghasilkan perancangan interior yang efektif dan memecahkan masalah yang ada bagi pengguna.
2. Menghasilkan Hubungan ruang yang sesuai alur kerja dan efektif sehingga menunjang Aktifitas yang ada di Kantor walikota dan pusat pelayanan publik.
3. Menghadirkan desain yang bersifat sebagai pemecah masalah terhadap permasalahan pengguna dan permasalahan interior lainnya.
4. Menghadirkan desain dan studi tentang peningkatan efektifitas kerja dan desain ruang yang optimal.
5. Menghadirkan Tata ruang yang kaya akan unsur Budaya Lokal dalam perancangan dimana sebagai ajang promosi bagi kota payakumbuh sendiri.

## **1.6.Metodologi Perancangan**

Metode pengumpulan data yang dilakukan antara lain:

### **a. Observasi**

Survey lapangan perlu dilakukan supaya perancang dapat mengetahui lebih jelas bagaimana kondisi dan keadaan yang ada dalam kantor dan training center itu sendiri. Perancang melakukan observasi langsung ke lokasi kantor Grab Kota Bandung

### **b. Wawancara**

Wawancara kepada beberapa staff manajemen dan staff bidang personalia umum PU, yang berkepentingan memberikan data tentang kegiatan dalam bangunan dan informasi tentang data fisik bangunan, untuk memperkuat data yang valid terhadap laporan perancangan.

#### c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui teknik ini dimaksudkan untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dengan analisis dokumentasi ini diharapkan data yang diperlukan menjadi benar-benar valid. Dokumentasi yang dapat dijadikan sumber antara lain foto, laporan penelitian, buku-buku yang sesuai dengan penelitian, dan data tertulis lainnya.

#### d. Analisa data

Metode yang digunakan setelah memperoleh suatu data yang didapat, analisa dilakukan dengan melihat permasalahan yang ada, setelah melakukan wawancara dan dokumentasi.

#### e. Analisa Programming

Programming meliputi studi aktifitas, kebutuhan ruang, besaran ruang, matriks, zoning, blocking, dll.

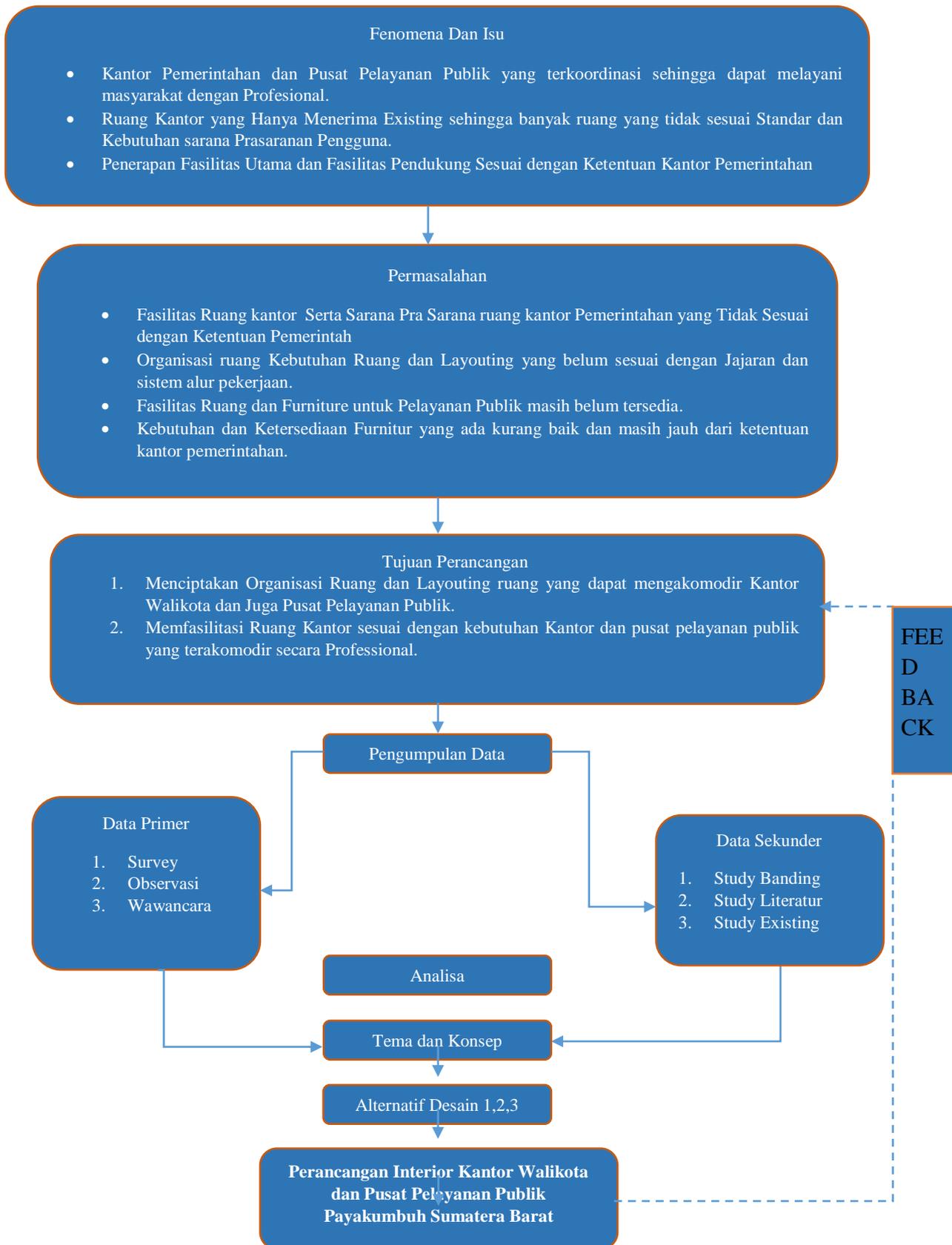
#### f. Konsep

Konsep adalah suatu hal umum yang menjelaskan atau menyusun suatu peristiwa, objek, situasi, ide, atau paparan pemikiran dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antar manusia dalam menjelaskan suatu olahan data.

#### g. Hasil Akhir

Hasil akhir pada perancangan kantor dan training center adalah sebuah data yang terangkum dalam penulisan, programming, konsep, lembar kerja dan bagian lainnya yang menjadi satu kesatuan.

## 1.7.Kerangka Berpikir



## 1.8.Sistematika Penulisan

- Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, identifikasi masalah perancangan resor, merumuskan masalah yang ada, tujuan perancangan, metode desain serta sistematika pengantar desain yang merupakan gambaran umum secara keseluruhan.

- Bab II Kajian Literatur

Berisi tentang kajian literatur , menjelaskan dasar pemikiran dari teori-teori atau literatur yang di gunakan sebagai dasar untuk merancang.

- Bab III Metode Perancangan

Menjelaskan mengenai metode perancangan yang digunakan meliputi objek perancangan, teknik pengumpulan, pengolahan dan teknik analisis data.

- Bab IV Hasil Perancangan

Membahas dan menarik kesimpulan dari hasil perancangan yang diuraikan secara sistematis sesuai dengan tujuan perancangan.

- Bab V Kesimpulan dan Saran

Berisi tentang jawaban dari permasalahan, yang terdiri dari kesimpulan dari tiap bab dengan jelas dan rinci serta saran dan kerimpulan yang berhubungan dengan pemecahan masalah.